

Peluang Besar di Teknologi Informasi

Pertemuan World Summit on Information Society (WSIS) II yang diselenggarakan 16-20 November 2005 di Tunis, merupakan media global untuk membantu masyarakat dunia memasuki era revolusi informasi. Indonesia sebagai negara anggota dalam forum pertemuan itu juga tak boleh tinggal diam. Peluang investasi di teknologi informasi pun makin terbuka.

Sebagai forum penting bagi pertemuan para aktivitas teknologi informasi internasional yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WSIS telah menelorkan beberapa kesepakatan penting. Salah satunya pada WSIS pertama di Jenewa, 2003 disepakati bahwa pada tahun 2015 separuh penduduk dunia harus memiliki sudah terakses oleh teknologi informasi. Target tersebut juga diterjemahkan bahwa pada 2015 separuh penduduk dunia harus terhubung ke jaringan internet.

Sejak saat itu, hampir semua negara peserta WSIS mulai sibuk berbenah diri meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasinya, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah kemudian mencanangkan program USO (Universal Service Obligation), terutama untuk meningkatkan jumlah sambungan jaringan telekomunikasi di daerah pedesaan. Ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses dan jasa telekomunikasi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat atau komunitas di suatu wilayah. Melalui USO, diharapkan 5.630 desa dapat tersentuh oleh akses telekomunikasi. Ini boleh dibilang sebagai gebrakan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan informasi di Tanah Air sekaligus sebagai upaya merealisasikan amanat dari pertemuan WSIS dimana tahun 2015 seluruh desa di Indonesia sudah harus terakses sarana komunikasi.

Menurut Rudy Rusdiah, Ketua Asosiasi Pengusaha Wernet Komunitas Telematika (APW Komitel) yang juga ikut terlibat dalam pertemuan WSIS tersebut, untuk meningkatkan penetrasi jaringan telekomunikasi dan internet di Indonesia, pemerintah harus menyusun tahapan *action plan* pembangunan



■ Rudy Rusdiah: Pemerintah harus segera menyusun *action plan*.

bidang telekomunikasi sebagai panduan bagi pelaku industri, termasuk juga swasta. Hal ini sangat penting mengingat untuk menggapai target tersebut, tidak mungkin ditangani pemerintah sendiri karena perlu dukungan investasi besar. "Ini menjadi tantangan bagi pemerintah, tetapi di sisi lain juga menjadi peluang tersendiri bagi investor," ungkap Rudy yang juga Presiden Direktur PT Micronics Internusa (distributor komputer Dell) kepada *Eksekutif* di Jakarta, belum lama ini.

Ia menekankan pentingnya langkah-langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapainya. Sebab saat ini penetrasi jaringan telepon di Indonesia masih rendah, apalagi di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Meski telepon selular meningkat pesat, namun jumlah sambungan *fixed line* masih sangat rendah. Keadaan inilah yang menuntut pemerintah untuk mendorong tumbuhnya pertelekomunikasian, khususnya untuk daerah-daerah yang belum terjangkau sarana telekomunikasi dengan melibatkan pihak swasta. "WSIS Tunis ini merupakan pertemuan kedua setelah dua tahun para kepala negara melakukan *commitment* melalui Declaration of Principal dan Plan of Actions pada pertemuan pertama di Geneva Desember

ber tahun 2003 lalu. Jadi forum WSIS Tunis boleh dikata semacam menagih janji mengenai apa yang direncanakan dua tahun silam oleh negara-negara peserta termasuk Indonesia. Karena itu, jangan sampai Indonesia membuat komitmen di luar kemampuan tanpa diikuti *action plan* yang jelas," tandasnya.

PELUANG INVESTASI

Menurutnya, di bidang Information and Communication Technology (ICT) ada beberapa hal penting yang perlu segera diantisipasi. Di antaranya mencakup *e-Indonesia Strategy* (strategi yang akan ditempuh pemerintah), *internet governance* dan financial mechanisms. Internet Governance merupakan pedoman mengenai mekanisme faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan dan pengaturan internet. Secara teknis misalnya mencakup hal-hal seperti resolusi nama domain dan spam, di samping juga mencakup hal-hal yang lebih tradisional seperti manajemen nomor IP dan manajemen nama domain. Kemudian yang tak kalah penting adalah financial mechanism, yakni mencakup mekanisme pembiayaan bagi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam proyek ini, apakah dibiayai sendiri melalui APBN atau dengan cara banyak melibatkan swasta. Ditambahkan, industri telematika (information and communication technology-ICT) termasuk bisnis raksasa karena dana yang diperlukan untuk sektor ini cukup besar. Sayangnya di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Namun ia optimistis penjualan pada tahun 2006 akan tumbuh. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, bisnis peranti lunak dan IT memiliki peluang besar. Menurut Rudy masih rendahnya perkembangan industri ini karena infrastrukturnya juga belum memadai. Indikatornya, antara lain, dari pemanfaatan komputer di Indonesia yang masih rendah. Begitu pula kepemilikan fasilitas internet di Indonesia yang masih terkonsentrasi di kota-kota besar saja.

Dari sisi pemerintah juga masih dikeluhkan banyak pihak, terutama kalangan dunia usaha. Meskipun pemerintah senantiasa menyatakan dukungan untuk mendorong dan menumbuhkan industri telematika di Indonesia. Tetapi fakta di lapangan, pengusaha merasa belum mendapat dukungan itu. Contohnya mengenai peraturan perpajakan yang memberatkan. Di sisi lain untuk menggairahkan investasi, juga diperlukan payung hukum yang memadai. Dengan perangkat hukum itu, program mewujudkan semua desa terjangkau jaringan telekomunikasi tahun 2015 diharapkan bisa terealisasi. ■ (Ach)